

# PENGARUH KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BADAN (UPTB) KOTA TASIKMALAYA

Deden Wahyu<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Pascasarjana, STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

Komp. LIK Jl. Perintis Kemerdekaan Kec. Kawalu - Tasikmalaya - 46182

\*Korespondensi Penulis: [dedenwahyu1973@gmail.com](mailto:dedenwahyu1973@gmail.com)

**Abstract:** *Tasikmalaya Mayor Regulation Number 89 of 2016, states that to increase the effectiveness of collecting taxes and levies in the City of Tasikmalaya, an Agency Technical Implementation Unit (UPTB) was formed, the UPTB was formed as an executor within the Agency in charge of managing operational technical activities and/or supporting technical activities. certain. UPTB Regional Tax Service is a structural work unit in the Agency and is responsible to the Head of the Agency. In fact, PBB revenue in the last three years has decreased and only an average of 66.86% has been realized of the target set, the ineffective PBB collection in Tasikmalaya City which is suspected of lack of coordination carried out by UPTB PBB with related parties. This study aims to determine and analyze the magnitude of the effect of coordination on the effectiveness of the work of PBB collectors in Tasikmalaya City. The research method used in this research is an explanatory research method with a quantitative approach, the collection of data generated through documentation studies and field studies in the form of observations and questionnaires, analyzed using path analysis. Based on the results of the research conducted, the authors concluded that the coordination carried out by the UPTB had a moderate effect on the effectiveness of PBB collectors in Tasikmalaya City with a contribution of 25.9% and the remaining 74.7% was influenced by other variables not studied. The dimension in the coordination variable that has the greatest influence on the effectiveness of the UN Collector's work is the communication dimension (30.1%), the second-largest influence of the coordination dimension on the effectiveness of the UN Collector's work is the dimension of unity of action (21.6%), while the having the least effect was the division of labour (3.8%).*

**Keywords:** *Coordination; PBB; Work Effectiveness*

---

## PENDAHULUAN

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 89 Tahun 2016, disebutkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi di Kota Tasikmalaya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Salah satu fungsi UPTB dalam peraturan ini adalah melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan pokok ketentuan Pajak Daerah hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di wilayah UPTB masing-masing dan selanjutnya bertanggungjawab kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya. Pada kenyataannya hasil pemungutan PBB belum optimal, bahkan prosentase pencapaian target pemungutan PBB masih di bawah prosentase hasil pemungutan PBB sebelum adanya kebijakan ini, dalam tiga tahun terakhir realisasi pendapatan daerah Kota Tasikmalaya yang dipungut dari PBB berkisar pada rata-rata 66,87% dari target yang telah ditetapkan, sedangkan untuk tahun 2019, sampai dengan akhir bulan Desember 2019 hanya terealisasi 63,64%. Dengan demikian banyak wajib pajak (khususnya PBB) di Kota Tasikmalaya yang menunggak atau belum melakukan pelunasan PBB.

Data ini menunjukkan efektivitas kerja pemungut PBB di Kota Tasikmalaya belum efektif, hal ini ditunjukkan dengan gejala dimana realisasi hasil pemungutan PBB yang menurun selama tiga tahun terakhir, pelunasan PBB terbanyak di akhir jatuh tempo, sebigian besar objek pajak yang menunggak adalah objek pajak dengan nominal yang besar, melibatkan banyak kolektor, sehingga harus mengeluarkan biaya lebih ditambah keterlambatan penyetoran dikarenakan terpakai oleh pemungut. Adanya gejala di atas, diduga akibat lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh UPTB

dengan pihak terkait (Kelurahan), hal ini disebabkan karena UPTB tidak melibatkan unsur kelurahan dalam pemungutan PBB.

## TINJAUAN PUSTAKA

Koordinasi adalah suatu proses di mana di dalam organisasi itu sendiri dapat dikembangkan suatu usaha kelompok secara teratur diantara setiap bagian untuk menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini pimpinan atau koordinator harus mampu memberikan penerangan langsung dan bersahabat sehingga akan merangsang timbulnya partisipasi bawahan, baik dalam ide maupun pelaksanaannya. Pengertian lain dari koordinasi dijelaskan oleh Handoko (2012: 195), koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Sugandha (2008: 18) berpendapat bahwa indikator koordinasi adalah sebagai berikut:

- a) Komunikasi  
Komunikasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikan kepada orang tersebut
- b) Pembagian Kerja  
Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.
- c) Kesatuan Tindakan  
Kesatuan tindakan adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan
- d) Tanggung Jawab  
Tanggung jawab adalah pertanggungjawaban atas kegiatan yang di lakukan. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan organisasi, oleh karena itu, koordinasi merupakan tugas seorang pimpinan. Pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila pimpinan dan bawahan tidak melakukan kerja sama.

Efektifitas berasal dari kata dasar “efek” yang berarti, segala sesuatu cenderung mengarah pada pencapaian target dan ketepatan waktu serta kualitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Kata “efek” juga dalam istilah efektivitas menunjukkan hubungan sebab akibat. Steers (2008: 35) mengatakan pengertian efektivitas kerja sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Lebih jauh efektivitas kerja menurut Steers (2008:36): efektivitas kerja adalah pengukuran dalam arti bahwa sejauh mana organisasi melaksanakan tugas atau mencapai tugas semua sasarannya dilihat dari jumlah kualitas dari jasa yang telah dihasilkan berdasar hasil yang telah ditentukan.

Dharma (2010, hal. 180) menyatakan: “efektivitas kerja pegawai adalah penyelesaian pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh seseorang tatas pekerjaannya”.

Hasil yang dicapai itu berupa nilai lebih dari suatu pengalaman dirinya dalam melaksanakan pekerjaan, bisa berupa pelaporan-pelaporan, bisa berupa data-data yang sesuai dengan tugas pekerjaannya, bahkan kekurangan kelemahan yang ditemukan selama dirinya melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Putra (2012, hal. 8) mengemukakan bahwa: Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa baik atau seberapa jauh sasaran (kuantitas, kualitas, waktu) telah tercapai.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Efektivitas kerja pemungut PBB di Kota Tasikmalaya merupakan kajian utama dalam penelitian ini yang diduga dipengaruhi oleh koordinasi pemungut PBB, sehingga penelitian ini akan mengungkap seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektivitas kerja pemungut PBB. Melihat pada keterkaitan hubungan antar

variabel, maka pada penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel bebas berupa koordinasi, dan satu variabel terikat yaitu efektivitas kerja pemungut PBB.

Adapun rincian variabel ke dalam sub variabel serta indikator dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 1.** Variabel, Sub Variabel dan Indikator

Variabel	Dimensi	Indikator
Koordinasi (Sugandha, 2012, hal. 18)	Komunikasi	a. UPTB PBB mengkomunikasikan rencana kerja terkait bidang PBB ke Tim Pelaksana PBB di Kelurahan dan Kecamatan b. UPTB PBB mengkomunikasikan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek/subjek PBB ke Tim Pelaksana PBB di Kelurahan dan Kecamatan c. UPTB PBB mengkomunikasikan teknis pelaksanaan pemungutan PBB ke Tim Pelaksana di Kelurahan dan Kecamatan d. UPTB PBB dan Tim Pelaksana Kelurahan berkomunikasi dengan Ketua RW untuk pelaksanaan pemungutan PBB e. Tim Pelaksana dan Ketua RW mengkomunikasikan pelaksanaan pemungutan PBB kepada pelaksana lapangan dan masyarakat
	Tanggung Jawab	a. UPTB PBB memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada Tim Pelaksana PBB masing-masing kelurahan untuk pelaksanaan kegiatan b. Tim pelaksana PBB Kelurahan bertanggungjawab terhadap hasil pungutan PBB c. UPTB PBB melakukan pengawasan secara berkala d. Tim pelaksana PBB Kelurahan melaporkan hasil pungutan PBB setiap akhir bulan
	Kesatuan Tindakan	a. Tim Pelaksana memberikan masukan tentang teknis pemungutan PBB b. UPTB PBB dan Tim Pelaksana PBB Kelurahan melakukan verifikasi pemungutan PBB secara berkala c. UPTB PBB dan Tim Pelaksana PBB Kelurahan bersama menindaklanjuti permasalahan dalam pungutan PBB
	Pembagian Kerja	a. Tim pelaksana PBB membentuk Panitia Pelaksana pungutan PBB berdasarkan unsur setempat b. Tim pelaksana PBB Kelurahan mengkoordinir pemungutan PBB dari setiap RW c. Tim pelaksana PBB Kelurahan membantu permasalahan dalam pemungut PBB di lapangan
Efektivitas Kerja (Putra, 2012, hal. 8)	Kualitas	a. Mendatangi wajib pajak b. Memberikan tanda bukti pembayaran sementara c. Memberikan tanda bukti yang resmi d. Melakukan pendekatan dengan objek pajak e. Memberikan pengertian tentang kegunaan PBB kepada objek pajak f. Bekerja sesuai instruksi g. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil pungutan secara berkala h. Menindaklanjuti permasalahan wajib pajak tentang PBB
	Kuantitas	a. Hasil pungutan sesuai target b. Hasil pungutan melebihi target c. Mendapat bonus dan penghargaan dari hasil pungutan
	Waktu	a. Mendatangi wajib pajak dengan tepat waktu b. Hasil pungutan tepat waktu c. Penyetoran PBB tepat waktu d. Pembuatan laporan hasil pungutan tuntas tepat waktu

**Sumber:** Penulis

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Dispenda Kota Tasikmalaya yang ditunjuk dalam UPTB berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 89 Tahun 2016 yang berjumlah 32 orang, dikarenakan populasinya sedikit, maka digunakan teknik sampling jenuh, dimana semua anggota populasi menjadi sampel.

Adapun teknik yang digunakan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (dokumentasi), yakni suatu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya.
2. Studi lapangan:
  - a) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian. Cara ini digunakan sebagai pelengkap data, baik yang dihasilkan dari wawancara, penyebaran angket maupun dokumentasi.
  - b) Wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terbuka kepada responden guna mendapatkan keterangan terkait dengan materi yang dibahas. Wawancara dilakukan hanya dengan beberapa responden saja.
  - c) Angket, yaitu dengan cara membuat daftar pernyataan berstruktur dengan bentuk pilihan ganda yang disusun secara sistematis dan logis. Pada penelitian ini, angket merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Adapun bentuk angket yang digunakan berbentuk tertutup, artinya konstruksi item pilihan ganda dan responden hanya menconteng kolom salah satu jawaban yang sesuai menurut penilaiannya. Angket disebarkan ke responden berjumlah 32 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hipotesis awal, besarnya pengaruh koordinasi terhadap efektivitas kerja pemungut PBB di Kota Tasikmalaya ditentukan oleh dimensi-dimensi koordinasi (komunikasi, tanggungjawab, pembagian tugas, dan kesatuan tindakan). Berikut tabel hasil uji t statistik antara variabel Koordinasi (X) Efektivitas Kerja Pemungut PBB di Kota Tasikmalaya (Y).

**Tabel 2.** Hasil Uji t Statistik X dengan Y

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20,294	6,087		3,334	,002
	Koordinasi	,485	,152	,503	3,188	,003

a. Dependent Variable: Efektivitas Kerja

Sumber: SPSS

Berdasarkan uji t dengan kriteria uji (dua sisi) pada taraf = 0,05 diperoleh nilai t hitung koordinasi sebesar 3,188 dimana  $t_{tabel} = 1,999$ , jadi  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan probabilitas (Sig.) sebesar 0,003. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, artinya  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas kerja pemungut PBB Kota Tasikmalaya.

### Pengujian Koefisien Regresi

$H_o$ : Tidak ada pengaruh antara koordinasi dengan efektivitas kerja pemungut PBB di Kota Tasikmalaya.

$H_a$ : Terdapat pengaruh antara koordinasi dengan efektivitas kerja pemungut PBB di Kota Tasikmalaya.

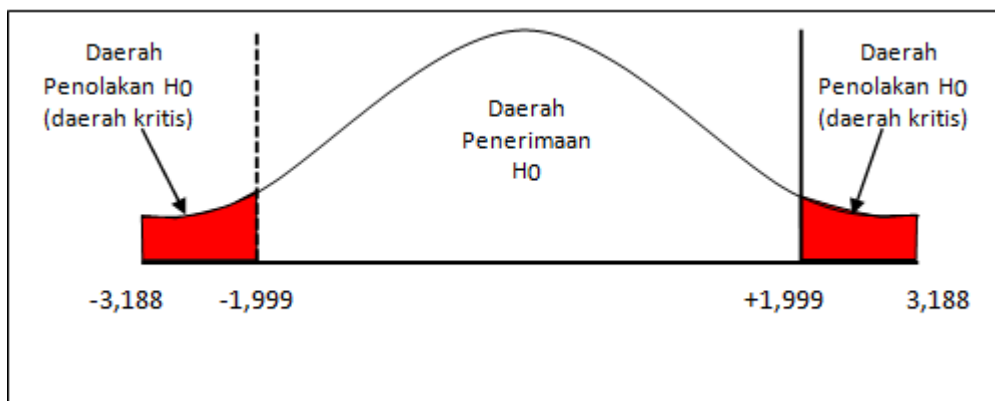
Tingkat signifikansi menggunakan 0,05 ( $\alpha = 5\%$ )

Kriteria pengujian:

- $H_o$  diterima jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$
- $H_o$  ditolak jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$

Berdasarkan uji t dengan kriteria uji (dua sisi) pada taraf = 0,05 diperoleh nilai t-hitung koordinasi sebesar 3,188 dimana  $t_{tabel} = 1,999$  jadi  $t_{hitung} > t_{tabel}$

$t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $H_o$  ditolak), artinya koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas kerja pemungut PBB. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.** Kurva Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Kerja

Dari Tabel 2 dapat diketahui persamaan regresi sederhana antara koordinasi dengan kinerja pegawai adalah  $Y = 20,294 + 0,485 X$ . Berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa jika tanpa adanya pengaruh dari variabel koordinasi, efektivitas kerja pemungut PBB ada sebesar 20,294, dan setiap kenaikan koordinasi satu satuan maka efektivitas kerja pemungut PBB mengalami kenaikan sebesar 0,485. Untuk menguji linier atau tidaknya persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Angka probabilitas dalam tabel menunjukkan 0,003 atau  $< 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan persamaan regresi di atas dapat memprediksi besarnya pengaruh koordinasi terhadap efektivitas kerja pemungut PBB.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh koordinasi terhadap efektivitas kerja pemungut PBB dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi dan determinasi yang dijelaskan dalam tabel koefisien korelasi antara X dengan Y berikut ini.

**Tabel 3.** Koefisien Korelasi Antara X dengan Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,503 <sup>a</sup>	,253	,228	6,378643

a. Predictors: (Constant), Koordinasi

Sumber: SPSS

Nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,503, angka ini menunjukkan bahwa variabel koordinasi mempunyai pengaruh yang sedang terhadap efektivitas kerja pemungut PBB Kota Tasikmalaya. Sedangkan besarnya pengaruh koordinasi terhadap efektivitas kerja pemungut PBB dapat dilihat dari koefisien determinasi (R-Square). Angka di tabel menunjukkan 0,253, dengan demikian dapat dikatakan bahwa koordinasi mempengaruhi efektivitas kerja sebesar 0,253. Ini artinya 25,3% efektivitas kerja pemungut PBB Kota Tasikmalaya dipengaruhi oleh koordinasi dan sisanya yaitu 74,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

## Pembahasan

### 1) Koordinasi

Berdasarkan data hasil penelitian melalui penyebaran angket terhadap 32 responden, skor rata-rata variabel koordinasi pada pemungutan PBB di Kota Tasikmalaya memperoleh skor rata-rata 110,27, termasuk ke dalam kategori baik, dengan prosentase sudah mencapai 68,98% dari skor maksimum. Skor rata-rata tertinggi terdapat pada dimensi tanggungjawab, sedangkan skor rata-rata terendah terdapat pada dimensi pembagian kerja. Untuk semua item pertanyaan, terdapat skor tertinggi pada item pertanyaan selama ini Tim pelaksana pemungut PBB di tiap Kelurahan melaporkan hasil pungutan PBB setiap akhir bulan ke koordinator UPTB, dan skor tertinggi lainnya adalah pada pernyataan selama ini UPTD PBB mengkomunikasikan rencana kerja terkait bidang PBB ke Tim Pelaksana PBB di Kelurahan dan Kecamatan. Skor terendah terdapat pada item pertanyaan selama ini UPTD PBB dan Tim Pelaksana PBB Kelurahan jarang menindaklanjuti permasalahan dalam pungutan PBB, dan skor terendah lainnya terdapat pada item pertanyaan selama ini Tim pelaksana PBB Kelurahan mengkoordinir pemungutan PBB dari

setiap RW.

## 2) Efektivitas Pengelolaan Kearsipan

Dari hasil penyebaran angket diketahui bahwa efektivitas kerja Pemungut PBB di Kota Tasikmalaya memperoleh skor rata-rata efektivitas kerja Pemungut PBB masuk dalam kategori sedang, karena memiliki skor rata-rata 105,6 dengan prosentase hanya mencapai 66% dari skor maksimal yang diharapkan. Indikator prosentase tertinggi terdapat pada aspek dimana pemungut PBB selalu mendatangi rumah wajib pajak, dan memberikan tanda bukti pembayaran sementara, sedangkan skor terendah terdapat pernyataan hasil pungutan belum sesuai target, dan pemungut PBB tidak memberikan pengertian tentang kegunaan PBB kepada wajib pajak.

## 3) Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Kerja Pemungut PBB

Koordinasi berpengaruh sedang terhadap efektivitas kerja Pemungut PBB, sedangkan besarnya pengaruh koordinasi terhadap efektivitas kerja pemungut PBB dapat dilihat dari koefisien determinasi ( $R^2$ ). Angka ditabel menunjukan 0,253, dengan demikian dapat dikatakan bahwa koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas kerja Pemungut PBB sebesar 0,253. Ini artinya 25,3% efektivitas pengelolaan kearsipan dipengaruhi oleh koordinasi, dan sisanya yaitu 74,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti, seperti kompetensi, kepemimpinan, pengawasan, dan lain-lain.

Jika tiap dimensi koordinasi dianggap variabel yang berdiri sendiri, maka untuk mengetahui pengaruh tiap dimensi variabel koordinasi terhadap efektivitas kerja pemungut PBB di Kota Tasikmalaya, dihitung korelasi dari tiap dimensi variabel koordinasi terhadap efektivitas kerja pemungut PBB di Kota Tasikmalaya. Dari ke empat dimensi dalam variabel koordinasi, dimensi yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap efektivitas kerja Pemungut PBB adalah dimensi komunikasi, pengaruh kedua terbesar dari dimensi koordinasi terhadap efektivitas kerja Pemungut PBB adalah pada dimensi kesatuan tindakan, sedangkan dimensi yang mempunyai pengaruh paling kecil adalah dimensi pembagian kerja.

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen agar tidak terjadi kekacauan, percekocoran, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat.

Hasil penelitian ini juga relevan dengan ke empat indikator koordinasi sesuai dengan pendapat Sugandha (2008:18), artinya jika masing-masing indikator koordinasi dilaksanakan dengan baik, maka akan menghasilkan efektivitas kerja yang baik pula. Berikut masing-masing pengaruh ke empat indikator koordinasi tersebut terhadap efektivitas kerja Pemungut PBB di Kota Tasikmalaya jika masing-masing indikator dianggap berdiri sendiri.

- a. Komunikasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan kearsipan di Kota Tasikmalaya dengan memberikan kontribusi sebesar 30,1%. Komunikasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikan kepada orang tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan komunikasi antara UPTB dengan pihak terkait dalam hal ini pihak kelurahan sudah dalam kategori baik, namun belum secara optimal, karena hanya memiliki nilai 69,13% dari skor maksimal, hasil penelitian menunjukkan nilai tertinggi pada indikator dimana UPTD PBB mengkomunikasikan rencana kerja terkait bidang PBB ke Tim Pelaksana PBB di Kelurahan dan Kecamatan, sedangkan skor terendah terdapat pada pernyataan dimana UPTB kurang mengkomunikasikan pelaksanaan pemungutan PBB kepada pelaksana lapangan dan masyarakat.
- b. Tanggung jawab berpengaruh rendah terhadap efektivitas kerja Pemungut PBB di Kota Tasikmalaya dengan memberikan kontribusi sebesar 15,2%. Tanggung jawab adalah pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi tanggungjawab dalam pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB di Kota Tasikmalaya termasuk dalam kategori baik, dan sudah mencapai 73,91% dari skor maksimal yang



diharapkan, nilai terendah terdapat pada aspek dimana UPTD PBB tidak melakukan pengawasan secara berkala dalam pemungutan PBB.

- c. Kesatuan tindakan berpengaruh sedang terhadap efektivitas kerja Pemungut PBB di Kota Tasikmalaya dengan memberikan kontribusi sebesar 21,6%. Kesatuan tindakan adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesatuan tindakan yang dilakukan oleh UPTB kepada pemungut PBB belum baik, dan hanya mencapai 63,33% dari skor maksimal yang diharapkan. Skor terendah terdapat pada pernyataan UPTD PBB dan Tim Pelaksana PBB Kelurahan jarang menindaklanjuti permasalahan dalam pungutan PBB.
- d. Pembagian kerja berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan PBB di Kota Tasikmalaya dengan memberikan kontribusi sebesar 3,8%. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kerja pegawai bagian kearsipan di Kota Tasikmalaya belum baik, hanya mencapai 67,5% dari skor maksimal, dimana indikator terendah sebagai pembagian kerja terdapat pada pernyataan dimana Tim pelaksana PBB Kelurahan kurang mengkoordinir pemungutan PBB dari setiap RW.

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis diperoleh kesimpulan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh UPTB berpengaruh sedang terhadap efektivitas kerja pemungut PBB di Kota Tasikmalaya dengan kontribusi sebesar 25,9% dan sisanya yaitu 74,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti, seperti kompetensi, kepemimpinan, pengawasan, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh koordinasi terhadap efektivitas kerja Pemungut PBB di Kota Tasikmalaya, penulis menyusun saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya UPTD PBB lebih meningkatkan lagi koordinasinya dengan pihak Kelurahan dalam hal pemungutan PBB.
2. Sebaiknya koordinator UPTB menindaklanjuti permasalahan yang dialami wajib pajak dalam pungutan PBB
3. Sebaiknya koordinator UPTB melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja pemungut PBB di lapangan, dan membuat laporan hasil pungutan setiap bulannya.
4. Dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis merasa penelitian ini jauh dari sempurna baik dari segi bahasa maupun sistematikanya, untuk itu diharapkan kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih mendalam mengenai efektivitas kerja Pemungut PBB serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di objek penelitian yang berbeda dan juga dapat mengambil sampel yang lebih besar untuk mengoptimalkan estimasi secara lebih tepat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dharma, A. 2004. Manajemen Prestasi Kerja. Jakarta: Bina Aksara.
- Gibson, James, L. 2007. Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Handayani, Soewarno. 2006. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta: Haji Masagung.
- Hasibuan Malayu S.P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Cetakan Kesepuluh.

Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta

Hani, T Handoko. 2012. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi Ke Lima. Yogyakarta: BPF.

Sugandha. 2008. Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi. Cetakan Ke Tiga. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

### **Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya.